



SALINAN

GUBERNUR JAWA BARAT

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG

TARGET PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 jo. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 118 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Target Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 4 Djuli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/209A6AE30C>

209A6AE30C

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6233);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 256);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 10);
11. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 118 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 119);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TARGET PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN 2023.



209A6AE30C

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/209A6AE30C>

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
5. Kepala Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Bapenda adalah Kepala K Badan Pendapatan Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
6. Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah pada Kepala Badan Pendapatan Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;.
7. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Pajak Kendaraan Bermotor selanjutnya disingkat PKB adalah pajak yang dipungut atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
9. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
10. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah Pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor.
11. Pajak Air Permukaan adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
12. Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah.
13. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.



BAB II TARGET PENERIMAAN

Pasal 2

Target penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tahun 2023 meliputi:

- a. Target Pajak Daerah, terdiri dari:
 1. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB);
 2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB);
 3. Pajak Air Permukaan (PAP);
 4. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB); dan
 5. Pajak Rokok.
- b. Target Retribusi Daerah, terdiri dari:
 1. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
 2. Retribusi Pelayanan Pendidikan;
 3. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (RPKD);
 4. Retribusi Penyeberangan di Air;
 5. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah;
 6. Retribusi Pelayanan Terminal;
 7. Retribusi Izin Trayek;
 8. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga;
 9. Retribusi Izin Usaha Perikanan; dan
 10. Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.

BAB III PENERIMAAN

Pasal 3

- (1) Target penerimaan PKB, BBNKB dan Pajak Air Permukaan Tahun 2023, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a angka 1, angka 2, dan angka 3 sebagai berikut:
 - a. Triwulan I sebesar 16% (enam belas persen);
 - b. Triwulan II sebesar 36% (tiga puluh enam persen);
 - c. Triwulan III sebesar 65% (enam puluh lima persen); dan
 - d. Triwulan IV sebesar 100% (seratus persen).
- (2) Target penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Tahun 2023, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a angka 4 sebagai berikut:
 - a. Triwulan I sebesar 20% (dua puluh persen);
 - b. Triwulan II sebesar 40% (empat puluh persen);



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/209A6AE30C>

- c. Triwulan III sebesar 60% (enam puluh persen); dan
 - d. Triwulan IV sebesar 100% (seratus persen).
- (2) Target penerimaan Pajak Rokok Tahun 2023, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a angka 5 sebagai berikut:
- a. Triwulan II sebesar 38% (tiga puluh delapan persen);
 - b. Triwulan III sebesar 61% (enam puluh satu persen); dan
 - c. Triwulan IV sebesar 100% (seratus persen).
- (3) Rincian target penerimaan Pajak Daerah tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tercantum dalam Huruf A Lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

- (1) Target Retribusi Daerah yang dipungut pada Perangkat Daerah ditetapkan sebagai berikut:
- a. Kelompok I, dengan target Triwulan I sebesar 10% (sepuluh persen), sampai dengan Triwulan II sebesar 25% (dua puluh lima persen), sampai dengan Triwulan III sebesar 60% (enam puluh persen) dan sampai dengan Triwulan IV sebesar 100% (seratus persen), meliputi:
 - 1. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah;
 - 2. Retribusi Izin Usaha Perikanan; dan
 - 3. Retribusi Pelayanan Pendidikan.
 - b. Kelompok II, dengan target Triwulan I sebesar 15% (lima belas persen), sampai dengan Triwulan II sebesar 40% (empat puluh persen), sampai dengan Triwulan III sebesar 65% (enam puluh lima persen), dan sampai dengan Triwulan IV sebesar 100% (seratus persen), meliputi:
 - 1. Retribusi Pelayanan Kesehatan; dan
 - 2. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga.
 - c. Kelompok III dengan pencapaian target Triwulan I sebesar 25% (dua puluh lima persen), sampai dengan Triwulan II sebesar 50% (lima puluh persen), sampai dengan Triwulan III sebesar 75% (tujuh puluh lima persen), dan sampai dengan Triwulan IV sebesar 100% (seratus persen), meliputi:
 - 1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
 - 2. Retribusi Terminal;
 - 3. Retribusi Izin Trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan umum;
 - 4. Retribusi Penyeberangan di Air; dan
 - 5. Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.



209A6AE30C

- (2) Rincian target penerimaan Retribusi Daerah tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Huruf B Lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

Target Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun sebagai bagian dari proses pengelolaan keuangan Daerah dan menjadi dasar pengukuran pencapaian kinerja untuk pemberian insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Target Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berdasarkan Peraturan Gubernur ini berlaku mulai 1 Januari 2023.

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 1 Februari 2023
GUBERNUR JAWA BARAT,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 1 Februari 2023

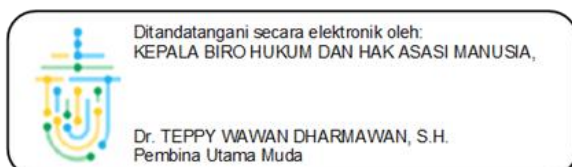
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

TTD.

SETIAWAN WANGSAATMAJA

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2023 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BIRO HUKUM DAN HAM,



209A6AE30C

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/209A6AE30C>

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR : 5 TAHUN 2023
TANGGAL : 1 FEBRUARI 2023
TENTANG : TARGET PENERIMAAN PAJAK
DAERAH DAN RETRIBUSI
DAERAH TAHUN 2023

A. TARGET PAJAK DAERAH TAHUN 2023

Triwulan	Jenis Pajak Daerah										Jumlah
	PKB		BBNKB		PBBKB		PAP		PAROK		
	%	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	
I	16.00	1,423,244,040,863.00	16.00	992,883,201,158.00	20.00	530,319,446,844.00	16.00	24,000,000,000.00	-	-	2,970,446,688,865.00
II	36.00	3,202,299,091,940.00	36.00	2,233,987,202,598.00	40.00	1,060,638,893,688.00	36.00	54,000,000,000.00	38.00	1,529,881,172,001.00	8,080,806,360,227.00
III	65.00	5,781,928,916,003.00	65.00	4,033,588,004,694.00	60.00	1,590,958,340,532.00	65.00	97,500,000,000.00	61.00	2,455,861,881,370.00	13,959,837,142,599.00
IV	100.00	8,895,275,255,390.00	100.00	6,205,520,007,233.00	100.00	2,651,597,233,945.00	100.00	150,000,000,000.00	100.00	4,026,003,084,214.00	21,928,395,580,782.00

Keterangan :

- Kolom 1 : Triwulan I. II. III dan IV dalam Tahun Anggaran 2023;
Kolom 2 : Persentase Target Pajak Kendaraan Bermotor (PKB);
Kolom 3 : Target Pajak Kendaraan Bermotor (PKB);
Kolom 4 : Persentase Target Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB);
Kolom 5 : Target Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB);
Kolom 6 : Persentase Target Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB);
Kolom 7 : Target Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB);
Kolom 8 : Persentase Target Pajak Air Permukaan (PAP);
Kolom 9 : Target Pajak Air Permukaan (PAP);
Kolom 10 : Persentase Target Pajak Rokok (Parok);
Kolom 11 : Target Pajak Rokok (Parok);
Kolom 12 : Jumlah Keseluruhan Target Pajak Daerah Triwulan I.II.III dan IV.
Target dan persentase pada setiap jenis Pajak Daerah dihitung secara kumulatif mulai dari triwulan I sampai dengan triwulan IV.



1. TARGET PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)

NO	PUSAT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	TARGET PKB	TARGET			
			TRIWULAN I	S.D. TRIWULAN II	S.D. TRIWULAN III	S.D. TRIWULAN IV
1.	WIL. DEPOK I	497,149,174,600.00	79,543,867,936.00	178,973,702,856.00	323,146,963,490.00	497,149,174,600.00
2.	WIL. DEPOK II CINERE	259,684,609,700.00	41,549,537,552.00	93,486,459,492.00	168,794,996,305.00	259,684,609,700.00
3.	WIL. KAB. BOGOR	770,429,647,100.00	123,268,743,536.00	277,354,672,956.00	500,779,270,615.00	770,429,647,100.00
4.	WIL. KOTA BOGOR	334,123,845,700.00	53,459,815,312.00	120,284,584,452.00	217,180,499,705.00	334,123,845,700.00
5.	WIL. KOTA SUKABUMI	67,910,658,000.00	10,865,705,280.00	24,447,836,880.00	44,141,927,700.00	67,910,658,000.00
6.	WIL. KAB. SUKABUMI I CIBADAK	139,469,136,500.00	22,315,061,840.00	50,208,889,140.00	90,654,938,725.00	139,469,136,500.00
7.	WIL. KAB. SUKABUMI II PALABUHAN RATU	55,834,610,300.00	8,933,537,648.00	20,100,459,708.00	36,292,496,695.00	55,834,610,300.00
8.	WIL. KAB. CIANJUR	173,397,511,600.00	27,743,601,856.00	62,423,104,176.00	112,708,382,540.00	173,397,511,600.00
9.	WIL. KOTA BEKASI	1,227,182,292,090.00	196,349,166,735.00	441,785,625,152.00	797,668,489,858.00	1,227,182,292,090.00
10.	WIL. KAB. BEKASI	922,187,826,500.00	147,550,052,240.00	331,987,617,540.00	599,422,087,225.00	922,187,826,500.00
11.	WIL. KAB. KARAWANG	401,723,601,900.00	64,275,776,304.00	144,620,496,684.00	261,120,341,235.00	401,723,601,900.00
12.	WIL. KAB. PURWAKARTA	132,528,004,900.00	21,204,480,784.00	47,710,081,764.00	86,143,203,185.00	132,528,004,900.00
13.	WIL. KAB. SUBANG	158,059,464,800.00	25,289,514,368.00	56,901,407,328.00	102,738,652,120.00	158,059,464,800.00
14.	WIL. KOTA CIREBON	119,156,949,000.00	19,065,111,840.00	42,896,501,640.00	77,452,016,850.00	119,156,949,000.00
15.	WIL. KAB. CIREBON I SUMBER	194,628,963,600.00	31,140,634,176.00	70,066,426,896.00	126,508,826,340.00	194,628,963,600.00
16.	WIL. KAB. CIREBON II CILEDUG	76,927,246,600.00	12,308,359,456.00	27,693,808,776.00	50,002,710,290.00	76,927,246,600.00
17.	WIL. KAB. INDRAMAYU I	138,166,053,700.00	22,106,568,592.00	49,739,779,332.00	89,807,934,905.00	138,166,053,700.00
18.	WIL. KAB. INDRAMAYU II HAURGEULIS	52,572,777,300.00	8,411,644,368.00	18,926,199,828.00	34,172,305,245.00	52,572,777,300.00
19.	WIL. KAB. KUNINGAN	117,308,331,500.00	18,769,333,040.00	42,230,999,340.00	76,250,415,475.00	117,308,331,500.00
20.	WIL. KAB. MAJALENGKA	125,361,958,700.00	20,057,913,392.00	45,130,305,132.00	81,485,273,155.00	125,361,958,700.00
21.	WIL. KOTA BANDUNG I PAJAJARAN	458,008,127,900.00	73,281,300,464.00	164,882,926,044.00	297,705,283,135.00	458,008,127,900.00
22.	WIL. KOTA BANDUNG II KAWALUYAAN	462,809,667,400.00	74,049,546,784.00	166,611,480,264.00	300,826,283,810.00	462,809,667,400.00
23.	WIL. KOTA BANDUNG III SOEKARNO HATTA	427,406,633,500.00	68,385,061,360.00	153,866,388,060.00	277,814,311,775.00	427,406,633,500.00
24.	WIL. KAB. BANDUNG BARAT	297,068,525,200.00	47,530,964,032.00	106,944,669,072.00	193,094,541,380.00	297,068,525,200.00
25.	WIL. KAB. BANDUNG I RANCAEKEK	240,810,962,100.00	38,529,753,936.00	86,691,946,356.00	156,527,125,365.00	240,810,962,100.00
26.	WIL. KAB. BANDUNG II SOREANG	265,215,100,900.00	42,434,416,144.00	95,477,436,324.00	172,389,815,585.00	265,215,100,900.00
27.	WIL. KAB. SUMEDANG	104,395,186,600.00	16,703,229,856.00	37,582,267,176.00	67,856,871,290.00	104,395,186,600.00
28.	WIL. KAB. GARUT	148,357,599,800.00	23,737,215,968.00	53,408,735,928.00	96,432,439,870.00	148,357,599,800.00
29.	WIL. KOTA TASIKMALAYA	108,768,918,100.00	17,403,026,896.00	39,156,810,516.00	70,699,796,765.00	108,768,918,100.00
30.	WIL. KAB. TASIKMALAYA	101,129,572,900.00	16,180,731,664.00	36,406,646,244.00	65,734,222,385.00	101,129,572,900.00
31.	WIL. KAB. CIAMIS	92,652,688,600.00	14,824,430,176.00	33,354,967,896.00	60,224,247,590.00	92,652,688,600.00
32.	WIL. KAB. PANGANDARAN	30,724,110,600.00	4,915,857,696.00	11,060,679,816.00	19,970,671,890.00	30,724,110,600.00
33.	WIL. KOTA CIMAHI	171,172,930,400.00	27,387,668,864.00	61,622,254,944.00	111,262,404,760.00	171,172,930,400.00
34.	WIL. KOTA BANJAR	22,952,567,300.00	3,672,410,768.00	8,262,924,228.00	14,919,168,745.00	22,952,567,300.00
JUMLAH SELURUHNYA		8,895,275,255,390.00	1,423,244,040,863.00	3,202,299,091,940.00	5,781,928,916,003.00	8,895,275,255,390.00

- Keterangan :
- 1. Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kab/Kota adalah UPTD yang berada di bawah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat. Yang melaksanakan kegiatan pemungutan PKB secara terintegrasi dengan sistem administasi manunggal satu atap (Samsat).
 - 2. Target PKB dihitung secara kumulatif mulai dari triwulan I sampai dengan triwulan IV.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/209A6AE30C>

2. TARGET BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)

NO	PUSAT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	TARGET BBNKB	TARGET			
			TRIWULAN I	S.D. TRIWULAN II	S.D. TRIWULAN III	S.D. TRIWULAN IV
1.	WIL. DEPOK I	335,739,326,400.00	53,718,292,224.00	120,866,157,504.00	218,230,562,160.00	335,739,326,400.00
2.	WIL. DEPOK II CINERE	181,518,502,817.00	29,042,960,451.00	65,346,661,014.00	117,987,026,831.00	181,518,502,817.00
3.	WIL. KAB. BOGOR	642,694,319,557.00	102,831,091,129.00	231,369,955,040.00	417,751,307,711.00	642,694,319,557.00
4.	WIL. KOTA BOGOR	233,586,198,417.00	37,373,791,747.00	84,091,031,430.00	151,831,028,971.00	233,586,198,417.00
5.	WIL. KOTA SUKABUMI	45,698,864,667.00	7,311,818,347.00	16,451,591,281.00	29,704,262,035.00	45,698,864,667.00
6.	WIL. KAB. SUKABUMI I CIBADAK	110,962,424,727.00	17,753,987,956.00	39,946,472,902.00	72,125,576,074.00	110,962,424,727.00
7.	WIL. KAB. SUKABUMI II PALABUHAN RATU	50,721,466,050.00	8,115,434,568.00	18,259,727,777.00	32,968,952,931.00	50,721,466,050.00
8.	WIL. KAB. CIANJUR	130,279,326,767.00	20,844,692,283.00	46,900,557,637.00	84,681,562,400.00	130,279,326,767.00
9.	WIL. KOTA BEKASI	837,029,406,377.00	133,924,705,020.00	301,330,586,295.00	544,069,114,145.00	837,029,406,377.00
10.	WIL. KAB. BEKASI	715,586,364,917.00	114,493,818,387.00	257,611,091,370.00	465,131,137,196.00	715,586,364,917.00
11.	WIL. KAB. KARAWANG	335,279,253,630.00	53,644,680,581.00	120,700,531,307.00	217,931,514,860.00	335,279,253,630.00
12.	WIL. KAB. PURWAKARTA	104,167,658,350.00	16,666,825,336.00	37,500,357,005.00	67,708,977,926.00	104,167,658,350.00
13.	WIL. KAB. SUBANG	151,052,138,950.00	24,168,342,232.00	54,378,770,021.00	98,183,890,316.00	151,052,138,950.00
14.	WIL. KOTA CIREBON	66,903,855,240.00	10,704,616,839.00	24,085,387,887.00	43,487,505,906.00	66,903,855,240.00
15.	WIL. KAB. CIREBON I SUMBER	147,922,834,433.00	23,667,653,509.00	53,252,220,395.00	96,149,842,380.00	147,922,834,433.00
16.	WIL. KAB. CIREBON II CILEDUG	55,883,112,367.00	8,941,297,979.00	20,117,920,453.00	36,324,023,040.00	55,883,112,367.00
17.	WIL. KAB. INDRAMAYU I	113,695,255,950.00	18,191,240,952.00	40,930,292,141.00	73,901,916,366.00	113,695,255,950.00
18.	WIL. KAB. INDRAMAYU II HAURGEULIS	47,362,535,667.00	7,578,005,707.00	17,050,512,841.00	30,785,648,185.00	47,362,535,667.00
19.	WIL. KAB. KUNINGAN	66,433,845,297.00	10,629,415,248.00	23,916,184,308.00	43,181,999,445.00	66,433,845,297.00
20.	WIL. KAB. MAJALENGKA	78,809,412,333.00	12,609,505,973.00	28,371,388,439.00	51,226,118,015.00	78,809,412,333.00
21.	WIL. KOTA BANDUNG I PAJAJARAN	241,932,151,817.00	38,709,144,291.00	87,095,574,654.00	157,255,898,681.00	241,932,151,817.00
22.	WIL. KOTA BANDUNG II KAWALUYAAN	244,407,390,400.00	39,105,182,464.00	87,986,660,544.00	158,864,803,760.00	244,407,390,400.00
23.	WIL. KOTA BANDUNG III SOEKARNO HATTA	252,593,674,917.00	40,414,987,987.00	90,933,722,970.00	164,185,888,696.00	252,593,674,917.00
24.	WIL. KAB. BANDUNG BARAT	198,734,552,650.00	31,797,528,424.00	71,544,438,953.00	129,177,459,221.00	198,734,552,650.00
25.	WIL. KAB. BANDUNG I RANCAEKEK	166,527,648,247.00	26,644,423,719.00	59,949,953,368.00	108,242,971,360.00	166,527,648,247.00
26.	WIL. KAB. BANDUNG II SOREANG	169,485,742,883.00	27,117,718,861.00	61,014,867,438.00	110,165,732,874.00	169,485,742,883.00
27.	WIL. KAB. SUMEDANG	66,412,469,600.00	10,625,995,136.00	23,908,489,056.00	43,168,105,240.00	66,412,469,600.00
28.	WIL. KAB. GARUT	115,614,269,183.00	18,498,283,069.00	41,621,136,906.00	75,149,274,969.00	115,614,269,183.00
29.	WIL. KOTA TASIKMALAYA	63,934,113,150.00	10,229,458,104.00	23,016,280,733.00	41,557,173,546.00	63,934,113,150.00
30.	WIL. KAB. TASIKMALAYA	62,723,982,533.00	10,035,837,205.00	22,580,633,711.00	40,770,588,645.00	62,723,982,533.00
31.	WIL. KAB. CIAMIS	49,960,402,950.00	7,993,664,472.00	17,985,745,061.00	32,474,261,916.00	49,960,402,950.00
32.	WIL. KAB. PANGANDARAN	17,305,115,383.00	2,768,818,461.00	6,229,841,538.00	11,248,324,999.00	17,305,115,383.00
33.	WIL. KOTA CIMAHI	92,400,190,783.00	14,784,030,525.00	33,264,068,682.00	60,060,124,009.00	92,400,190,783.00
34.	WIL. KOTA BANJAR	12,162,199,824.00	1,945,951,972.00	4,378,391,937.00	7,905,429,885.00	12,162,199,824.00
JUMLAH SELURUHNYA		6,205,520,007,233.00	992,883,201,158.00	2,233,987,202,598.00	4,033,588,004,694.00	6,205,520,007,233.00

Keterangan :

1. Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kab/Kota adalah UPTD yang berada di bawah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat. Yang melaksanakan kegiatan pemungutan BBNKB secara terintegrasi dengan sistem administasi manunggal satu atap (Samsat).
2. Target BBNKB dihitung secara kumulatif mulai dari triwulan I sampai dengan triwulan IV.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/209A6AE30C>

3. TARGET PAJAK AIR PERMUKAAN (PAP)

NO	PUSAT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	TARGET PAP	TARGET			
			TRIWULAN I	S.D. TRIWULAN II	S.D. TRIWULAN III	S.D. TRIWULAN IV
1.	WIL. DEPOK I	528,328,400.00	84,532,544.00	190,198,224.00	343,413,460.00	528,328,400.00
2.	WIL. DEPOK II CINERE	180,690,100.00	28,910,416.00	65,048,436.00	117,448,565.00	180,690,100.00
3.	WIL. KAB. BOGOR	9,984,094,100.00	1,597,455,056.00	3,594,273,876.00	6,489,661,165.00	9,984,094,100.00
4.	WIL. KOTA BOGOR	863,692,300.00	138,190,768.00	310,929,228.00	561,399,995.00	863,692,300.00
5.	WIL. KOTA SUKABUMI	1,714,500.00	274,320.00	617,220.00	1,114,425.00	1,714,500.00
6.	WIL. KAB. SUKABUMI I CIBADAK	3,282,464,800.00	525,194,368.00	1,181,687,328.00	2,133,602,120.00	3,282,464,800.00
7.	WIL. KAB. SUKABUMI II PALABUHAN RATU	1,486,356,200.00	237,816,992.00	535,088,232.00	966,131,530.00	1,486,356,200.00
8.	WIL. KAB. CIANJUR	7,327,973,100.00	1,172,475,696.00	2,638,070,316.00	4,763,182,515.00	7,327,973,100.00
9.	WIL. KOTA BEKASI	2,250,177,000.00	360,028,320.00	810,063,720.00	1,462,615,050.00	2,250,177,000.00
10.	WIL. KAB. BEKASI	15,744,909,200.00	2,519,185,472.00	5,668,167,312.00	10,234,190,980.00	15,744,909,200.00
11.	WIL. KAB. KARAWANG	16,315,356,900.00	2,610,457,104.00	5,873,528,484.00	10,604,981,985.00	16,315,356,900.00
12.	WIL. KAB. PURWAKARTA	30,352,591,000.00	4,856,414,560.00	10,926,932,760.00	19,729,184,150.00	30,352,591,000.00
13.	WIL. KAB. SUBANG	1,263,476,500.00	202,156,240.00	454,851,540.00	821,259,725.00	1,263,476,500.00
14.	WIL. KOTA CIREBON	-	-	-	-	-
15.	WIL. KAB. CIREBON I SUMBER	413,394,000.00	66,143,040.00	148,821,840.00	268,706,100.00	413,394,000.00
16.	WIL. KAB. CIREBON II CILEDUG	299,313,200.00	47,890,112.00	107,752,752.00	194,553,580.00	299,313,200.00
17.	WIL. KAB. INDRAMAYU I	705,283,300.00	112,845,328.00	253,901,988.00	458,434,145.00	705,283,300.00
18.	WIL. KAB. INDRAMAYU II HAURGEULIS	-	-	-	-	-
19.	WIL. KAB. KUNINGAN	1,027,994,100.00	164,479,056.00	370,077,876.00	668,196,165.00	1,027,994,100.00
20.	WIL. KAB. MAJALENGKA	545,211,900.00	87,233,904.00	196,276,284.00	354,387,735.00	545,211,900.00
21.	WIL. KOTA BANDUNG I PAJAJARAN	94,226,900.00	15,076,304.00	33,921,684.00	61,247,485.00	94,226,900.00
22.	WIL. KOTA BANDUNG II KAWALUYAAN	1,046,600,600.00	167,456,096.00	376,776,216.00	680,290,390.00	1,046,600,600.00
23.	WIL. KOTA BANDUNG III SOEKARNO HATTA	79,574,800.00	12,731,968.00	28,646,928.00	51,723,620.00	79,574,800.00
24.	WIL. KAB. BANDUNG BARAT	38,406,216,600.00	6,144,994,656.00	13,826,237,976.00	24,964,040,790.00	38,406,216,600.00
25.	WIL. KAB. BANDUNG I RANCAEKEK	5,000,877,800.00	800,140,448.00	1,800,316,008.00	3,250,570,570.00	5,000,877,800.00
26.	WIL. KAB. BANDUNG II SOREANG	6,602,963,600.00	1,056,474,176.00	2,377,066,896.00	4,291,926,340.00	6,602,963,600.00
27.	WIL. KAB. SUMEDANG	2,923,589,500.00	467,774,320.00	1,052,492,220.00	1,900,333,175.00	2,923,589,500.00
28.	WIL. KAB. GARUT	1,547,659,600.00	247,625,536.00	557,157,456.00	1,005,978,740.00	1,547,659,600.00
29.	WIL. KOTA TASIKMALAYA	36,007,300.00	5,761,168.00	12,962,628.00	23,404,745.00	36,007,300.00
30.	WIL. KAB. TASIKMALAYA	382,198,500.00	61,151,760.00	137,591,460.00	248,429,025.00	382,198,500.00
31.	WIL. KAB. CIAMIS	214,138,700.00	34,262,192.00	77,089,932.00	139,190,155.00	214,138,700.00
32.	WIL. KAB. PANGANDARAN	18,596,000.00	2,975,360.00	6,694,560.00	12,087,400.00	18,596,000.00
33.	WIL. KOTA CIMAHI	945,822,400.00	151,331,584.00	340,496,064.00	614,784,560.00	945,822,400.00
34.	WIL. KOTA BANJAR	128,507,100.00	20,561,136.00	46,262,556.00	83,529,615.00	128,507,100.00
JUMLAH SELURUHNYA		150,000,000,000.00	24,000,000,000.00	54,000,000,000.00	97,500,000,000.00	150,000,000,000.00

Keterangan :

1. Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kab/Kota adalah UPTD yang berada di bawah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat. Yang melaksanakan kegiatan pemungutan PAP secara terintegrasi dengan sistem administasi manunggal satu atap (Samsat).
2. Target PAP dihitung secara kumulatif mulai dari triwulan I sampai dengan triwulan IV.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/209A6AE30C>

4. TARGET PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)

NO	PUSAT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	TARGET PBBKB	TARGET			
			TRIWULAN I	S.D. TRIWULAN II	S.D. TRIWULAN III	S.D. TRIWULAN IV
1.	WIL. DEPOK I	135,553,195,120.00	27,110,639,028.00	54,221,278,056.00	81,331,917,084.00	135,553,195,120.00
2.	WIL. DEPOK II CINERE		-	-	-	-
3.	WIL. KAB. BOGOR	281,599,624,910.00	56,319,924,987.00	112,639,849,974.00	168,959,774,961.00	281,599,624,910.00
4.	WIL. KOTA BOGOR	77,788,102,550.00	15,557,620,512.00	31,115,241,024.00	46,672,861,536.00	77,788,102,550.00
5.	WIL. KOTA SUKABUMI	36,437,081,090.00	7,287,416,220.00	14,574,832,440.00	21,862,248,660.00	36,437,081,090.00
6.	WIL. KAB. SUKABUMI I CIBADAK	74,610,680,460.00	14,922,136,095.00	29,844,272,190.00	44,766,408,285.00	74,610,680,460.00
7.	WIL. KAB. SUKABUMI II PALABUHAN RATU		-	-	-	-
8.	WIL. KAB. CIANJUR	80,196,160,470.00	16,039,232,097.00	32,078,464,194.00	48,117,696,291.00	80,196,160,470.00
9.	WIL. KOTA BEKASI	225,957,437,630.00	45,191,487,531.00	90,382,975,062.00	135,574,462,593.00	225,957,437,630.00
10.	WIL. KAB. BEKASI	240,741,821,500.00	48,148,364,304.00	96,296,728,608.00	144,445,092,912.00	240,741,821,500.00
11.	WIL. KAB. KARAWANG	199,971,783,870.00	39,994,356,777.00	79,988,713,554.00	119,983,070,331.00	199,971,783,870.00
12.	WIL. KAB. PURWAKARTA	89,253,791,850.00	17,850,758,373.00	35,701,516,746.00	53,552,275,119.00	89,253,791,850.00
13.	WIL. KAB. SUBANG	85,381,429,990.00	17,076,285,999.00	34,152,571,998.00	51,228,857,997.00	85,381,429,990.00
14.	WIL. KOTA CIREBON	31,023,687,240.00	6,204,737,448.00	12,409,474,896.00	18,614,212,344.00	31,023,687,240.00
15.	WIL. KAB. CIREBON I SUMBER	113,236,675,680.00	22,647,335,139.00	45,294,670,278.00	67,942,005,417.00	113,236,675,680.00
16.	WIL. KAB. CIREBON II CILEDUG		-	-	-	-
17.	WIL. KAB. INDRAMAYU I	83,904,515,950.00	16,780,903,191.00	33,561,806,382.00	50,342,709,573.00	83,904,515,950.00
18.	WIL. KAB. INDRAMAYU II HAURGEULIS		-	-	-	-
19.	WIL. KAB. KUNINGAN	38,182,999,240.00	7,636,599,849.00	15,273,199,698.00	22,909,799,547.00	38,182,999,240.00
20.	WIL. KAB. MAJALENGKA	60,191,256,030.00	12,038,251,206.00	24,076,502,412.00	36,114,753,618.00	60,191,256,030.00
21.	WIL. KOTA BANDUNG I PAJAJARAN		-	-	-	-
22.	WIL. KOTA BANDUNG II KAWALUYAAN		-	-	-	-
23.	WIL. KOTA BANDUNG III SOEKARNO HATTA	234,761,372,620.00	46,952,274,528.00	93,904,549,056.00	140,856,823,584.00	234,761,372,620.00
24.	WIL. KAB. BANDUNG BARAT	56,479,022,200.00	11,295,804,441.00	22,591,608,882.00	33,887,413,323.00	56,479,022,200.00
25.	WIL. KAB. BANDUNG I RANCAEKEK		-	-	-	-
26.	WIL. KAB. BANDUNG II SOREANG	140,610,500,500.00	28,122,100,104.00	56,244,200,208.00	84,366,300,312.00	140,610,500,500.00
27.	WIL. KAB. SUMEDANG	63,638,333,130.00	12,727,666,626.00	25,455,333,252.00	38,182,999,878.00	63,638,333,130.00
28.	WIL. KAB. GARUT	70,807,924,970.00	14,161,584,996.00	28,323,169,992.00	42,484,754,988.00	70,807,924,970.00
29.	WIL. KOTA TASIKMALAYA	53,562,262,940.00	10,712,452,590.00	21,424,905,180.00	32,137,357,770.00	53,562,262,940.00
30.	WIL. KAB. TASIKMALAYA	45,342,305,050.00	9,068,461,011.00	18,136,922,022.00	27,205,383,033.00	45,342,305,050.00
31.	WIL. KAB. CIAMIS	47,728,749,550.00	9,545,749,911.00	19,091,499,822.00	28,637,249,733.00	47,728,749,550.00
32.	WIL. KAB. PANGANDARAN	21,507,830,510.00	4,301,566,101.00	8,603,132,202.00	12,904,698,303.00	21,507,830,510.00
33.	WIL. KOTA CIMAHI	46,668,109,815.00	9,333,621,963.00	18,667,243,926.00	28,000,865,889.00	46,668,109,815.00
34.	WIL. KOTA BANJAR	16,460,579,080.00	3,292,115,817.00	6,584,231,634.00	9,876,347,451.00	16,460,579,080.00
JUMLAH SELURUHNYA		2,651,597,233,945.00	530,319,446,844.00	1,060,638,893,688.00	1,590,958,340,532.00	2,651,597,233,945.00

Keterangan :

1. Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kab/Kota adalah UPTD yang berada di bawah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat. Yang melaksanakan kegiatan pemungutan PBBKB secara terintegrasi dengan sistem administasi manunggal satu atap (Samsat).
2. Target PBBKB dihitung secara kumulatif mulai dari triwulan I sampai dengan triwulan IV.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/209A6AE30C>

5. TARGET PAJAK ROKOK

NO	PUSAT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	TARGET PAROK	TARGET			
			TRIWULAN I	S.D. TRIWULAN II	S.D. TRIWULAN III	S.D. TRIWULAN IV
1.	WIL. DEPOK I	157,453,577,709.00	-	59,832,359,529.00	96,046,682,402.00	157,453,577,709.00
2.	WIL. DEPOK II CINERE	-	-	-	-	-
3.	WIL. KAB. BOGOR	445,768,202,498.00	-	169,391,916,949.00	271,918,603,523.00	445,768,202,498.00
4.	WIL. KOTA BOGOR	91,006,023,845.00	-	34,582,289,061.00	55,513,674,545.00	91,006,023,845.00
5.	WIL. KOTA SUKABUMI	29,446,407,196.00	-	11,189,634,735.00	17,962,308,390.00	29,446,407,196.00
6.	WIL. KAB. SUKABUMI I CIBADAK	226,260,751,187.00	-	85,979,085,451.00	138,019,058,224.00	226,260,751,187.00
7.	WIL. KAB. SUKABUMI II PALABUHAN RATU	-	-	-	-	-
8.	WIL. KAB. CIANJUR	204,627,179,790.00	-	77,758,328,320.00	124,822,579,672.00	204,627,179,790.00
9.	WIL. KOTA BEKASI	204,537,781,446.00	-	77,724,356,950.00	124,768,046,683.00	204,537,781,446.00
10.	WIL. KAB. BEKASI	254,928,482,255.00	-	96,872,823,257.00	155,506,374,176.00	254,928,482,255.00
11.	WIL. KAB. KARAWANG	203,835,838,896.00	-	77,457,618,781.00	124,339,861,727.00	203,835,838,896.00
12.	WIL. KAB. PURWAKARTA	83,443,255,079.00	-	31,708,436,930.00	50,900,385,598.00	83,443,255,079.00
13.	WIL. KAB. SUBANG	132,385,537,168.00	-	50,306,504,124.00	80,755,177,673.00	132,385,537,168.00
14.	WIL. KOTA CIREBON	28,477,511,259.00	-	10,821,454,278.00	17,371,281,868.00	28,477,511,259.00
15.	WIL. KAB. CIREBON I SUMBER	197,013,586,410.00	-	74,865,162,836.00	120,178,287,710.00	197,013,586,410.00
16.	WIL. KAB. CIREBON II CILEDUG	-	-	-	-	-
17.	WIL. KAB. INDRAMAYU I	156,355,219,726.00	-	59,414,983,496.00	95,376,684,033.00	156,355,219,726.00
18.	WIL. KAB. INDRAMAYU II HAURGEULIS	-	-	-	-	-
19.	WIL. KAB. KUNINGAN	99,710,939,228.00	-	37,890,156,907.00	60,823,672,929.00	99,710,939,228.00
20.	WIL. KAB. MAJALENGKA	110,000,854,132.00	-	41,800,324,570.00	67,100,521,020.00	110,000,854,132.00
21.	WIL. KOTA BANDUNG I PAJAJARAN	-	-	-	-	-
22.	WIL. KOTA BANDUNG II KAWALUYAAN	-	-	-	-	-
23.	WIL. KOTA BANDUNG III SOEKARNO HATTA	209,460,981,341.00	-	79,595,172,909.00	127,771,198,617.00	209,460,981,341.00
24.	WIL. KAB. BANDUNG BARAT	148,955,437,384.00	-	56,603,066,206.00	90,862,816,804.00	148,955,437,384.00
25.	WIL. KAB. BANDUNG I RANCAEKEK	-	-	-	-	-
26.	WIL. KAB. BANDUNG II SOREANG	302,619,849,743.00	-	114,995,542,902.00	184,598,108,343.00	302,619,849,743.00
27.	WIL. KAB. SUMEDANG	97,346,353,039.00	-	36,991,614,155.00	59,381,275,354.00	97,346,353,039.00
28.	WIL. KAB. GARUT	221,471,731,584.00	-	84,159,258,002.00	135,097,756,266.00	221,471,731,584.00
29.	WIL. KOTA TASIKMALAYA	61,026,289,308.00	-	23,189,989,937.00	37,226,036,478.00	61,026,289,308.00
30.	WIL. KAB. TASIKMALAYA	155,775,041,031.00	-	59,194,515,592.00	95,022,775,029.00	155,775,041,031.00
31.	WIL. KAB. CIAMIS	104,630,579,744.00	-	39,759,620,303.00	63,824,653,644.00	104,630,579,744.00
32.	WIL. KAB. PANGANDARAN	35,849,646,335.00	-	13,622,865,607.00	21,868,284,265.00	35,849,646,335.00
33.	WIL. KOTA CIMAHI	46,533,493,386.00	-	17,682,727,487.00	28,385,430,966.00	46,533,493,386.00
34.	WIL. KOTA BANJAR	17,082,533,495.00	-	6,491,362,727.00	10,420,345,431.00	17,082,533,495.00
JUMLAH SELURUHNYA		4,026,003,084,214.00	-	1,529,881,172,001.00	2,455,861,881,370.00	4,026,003,084,214.00

Keterangan :

1. Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kab/Kota adalah UPTD yang berada di bawah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat. Yang melaksanakan kegiatan pemungutan Pajak Rokok secara terintegrasi dengan sistem admnistasi manunggal satu atap (Samsat).
2. Target Pajak Rokok dihitung secara kumulatif mulai dari triwulan I sampai dengan triwulan IV.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/209A6AE30C>

B. TARGET PENERIMAAN PER JENIS RETRIBUSI DAERAH PER TRIWULAN TAHUN 2023

No	Perangkat Daerah	Jenis Retribusi	Target	Target							
				Triwulan I	%	Triwulan II	%	Triwulan III	%	Triwulan IV	%
1	Dinas Kesehatan	Retribusi Pelayanan Kesehatan	11,632,572,710.00	1,744,885,907.00	15.00	4,653,029,085.00	40.00	7,561,172,263.00	65.00	11,632,572,710.00	100.00
		Retribusi Pemakaian Kekayan Daerah	311,032,000.00	77,758,000.00	25.00	155,516,000.00	50.00	233,274,000.00	75.00	311,032,000.00	100.00
2	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Retribusi Pemakaian Kekayan Daerah	1,079,478,316.00	269,869,579.00	25.00	539,739,158.00	50.00	809,608,737.00	75.00	1,079,478,316.00	100.00
3	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang	Retribusi Pemakaian Kekayan Daerah	1,500,000,000.00	375,000,000.00	25.00	750,000,000.00	50.00	1,125,000,000.00	75.00	1,500,000,000.00	100.00
4	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Retribusi Pemakaian Kekayan Daerah	25,850,000.00	6,462,500.00	25.00	12,925,000.00	50.00	19,387,500.00	75.00	25,850,000.00	100.00
		Retribusi Perpanjangan IMTA	1,727,823,240.00	431,955,810.00	25.00	863,911,620.00	50.00	1,295,867,430.00	75.00	1,727,823,240.00	100.00
5	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Retribusi Pemakaian Kekayan Daerah	413,684,000.00	103,421,000.00	25.00	206,842,000.00	50.00	310,263,000.00	75.00	413,684,000.00	100.00
6	Dinas Kelautan dan Perikanan	Retribusi Pemakaian Kekayan Daerah	221,760,000.00	55,440,000.00	25.00	110,880,000.00	50.00	166,320,000.00	75.00	221,760,000.00	100.00
		Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	56,000,000.00	8,400,000.00	15.00	22,400,000.00	40.00	36,400,000.00	65.00	56,000,000.00	100.00
		Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	788,850,000.00	78,885,000.00	10.00	197,212,500.00	25.00	473,310,000.00	60.00	788,850,000.00	100.00
		Retribusi Izin Usaha Tangkap	80,000,000.00	8,000,000.00	10.00	20,000,000.00	25.00	48,000,000.00	60.00	80,000,000.00	100.00
7	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	Retribusi Pemakaian Kekayan Daerah	199,600,000.00	49,900,000.00	25.00	99,800,000.00	50.00	149,700,000.00	75.00	199,600,000.00	100.00
		Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	2,354,100,000.00	235,410,000.00	10.00	588,525,000.00	25.00	1,412,460,000.00	60.00	2,354,100,000.00	100.00
8	Dinas Sosial	Retribusi Pemakaian Kekayan Daerah	10,150,000.00	2,537,500.00	25.00	5,075,000.00	50.00	7,612,500.00	75.00	10,150,000.00	100.00
9	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil	Retribusi Pemakaian Kekayan Daerah	500,000.00	125,000.00	25.00	250,000.00	50.00	375,000.00	75.00	500,000.00	100.00
10	Dinas Perumahan dan Permukiman	Retribusi Pemakaian Kekayan Daerah	3,864,000,000.00	966,000,000.00	25.00	1,932,000,000.00	50.00	2,898,000,000.00	75.00	3,864,000,000.00	100.00
11	Dinas Lingkungan Hidup	Retribusi Pemakaian Kekayan Daerah	835,090,000.00	208,772,500.00	25.00	417,545,000.00	50.00	626,317,500.00	75.00	835,090,000.00	100.00
12	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan	Retribusi Pelayanan Kesehatan	463,810,000.00	69,571,500.00	15.00	185,524,000.00	40.00	301,476,500.00	65.00	463,810,000.00	100.00
		Retribusi Pemakaian Kekayan Daerah	740,000,000.00	185,000,000.00	25.00	370,000,000.00	50.00	555,000,000.00	75.00	740,000,000.00	100.00
		Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	4,519,277,639.00	451,927,764.00	10.00	1,129,819,410.00	25.00	2,711,566,584.00	60.00	4,519,277,639.00	100.00
13	Dinas Energi Sumber Daya Mineral	Retribusi Pemakaian Kekayan Daerah	817,938,000.00	204,484,500.00	25.00	408,969,000.00	50.00	613,453,500.00	75.00	817,938,000.00	100.00
14	Dinas Perhubungan	Retribusi Pemakaian Kekayan Daerah	1,108,328,000.00	277,082,000.00	25.00	554,164,000.00	50.00	831,246,000.00	75.00	1,108,328,000.00	100.00
		Retribusi Terminal	926,347,500.00	231,586,875.00	25.00	463,173,750.00	50.00	694,760,625.00	75.00	926,347,500.00	100.00
		Retribusi Penyeberangan di Air	113,100,000.00	28,275,000.00	25.00	56,550,000.00	50.00	84,825,000.00	75.00	113,100,000.00	100.00
		Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	435,326,500.00	108,831,625.00	25.00	217,663,250.00	50.00	326,494,875.00	75.00	435,326,500.00	100.00
15	Dinas Perkebunan	Retribusi Pemakaian Kekayan Daerah	80,000,000.00	20,000,000.00	25.00	40,000,000.00	50.00	60,000,000.00	75.00	80,000,000.00	100.00
		Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	119,433,303.00	11,943,330.00	10.00	29,858,325.00	25.00	71,659,981.00	60.00	119,433,303.00	100.00
16	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	Retribusi Pemakaian Kekayan Daerah	39,804,000.00	9,951,000.00	25.00	19,902,000.00	50.00	29,853,000.00	75.00	39,804,000.00	100.00
17	Dinas Pendidikan	Retribusi Pemakaian Kekayan Daerah	-	-	25.00	-	50.00	-	75.00	-	100.00
18	Dinas Pemuda dan Olah Raga	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	897,400,000.00	134,610,000.00	15.00	358,960,000.00	40.00	583,310,000.00	65.00	897,400,000.00	100.00
19	Dinas Sumber Daya Air	Retribusi Pemakaian Kekayan Daerah	17,600,000.00	4,400,000.00	25.00	8,800,000.00	50.00	13,200,000.00	75.00	17,600,000.00	100.00
20	Dinas Kehutanan	Retribusi Pemakaian Kekayan Daerah	22,851,300.00	5,712,825.00	25.00	11,425,650.00	50.00	17,138,475.00	75.00	22,851,300.00	100.00
21	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Retribusi Pelayanan Pendidikan	17,899,980,000.00	1,789,998,000.00	10.00	4,474,995,000.00	25.00	10,739,988,000.00	60.00	17,899,980,000.00	100.00
		Retribusi Pemakaian Kekayan Daerah	200,000,000.00	50,000,000.00	25.00	100,000,000.00	50.00	150,000,000.00	75.00	200,000,000.00	100.00
22	Badan Pendapatan Dearah	Retribusi Pemakaian Kekayan Daerah	826,814,935.00	206,703,734.00	25.00	413,407,468.00	50.00	620,111,202.00	75.00	826,814,935.00	100.00
23	Badan Kepegawaian Daerah	Retribusi Pemakaian Kekayan Daerah	2,750,000.00	687,500.00	25.00	1,375,000.00	50.00	2,062,500.00	75.00	2,750,000.00	100.00
24	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	Retribusi Pemakaian Kekayan Daerah	12,000,000.00	3,000,000.00	25.00	6,000,000.00	50.00	9,000,000.00	75.00	12,000,000.00	100.00
25	Biro Kesejahteraan Rakyat	Retribusi Pemakaian Kekayan Daerah	1,055,000,000.00	263,750,000.00	25.00	527,500,000.00	50.00	791,250,000.00	75.00	1,055,000,000.00	100.00
26	Biro Umum	Retribusi Pemakaian Kekayan Daerah	402,300,000.00	100,575,000.00	25.00	201,150,000.00	50.00	301,725,000.00	75.00	402,300,000.00	100.00
		Total Target	55,800,551,443.00	8,780,913,449.00	15.74	20,154,887,216.00	36.12	36,681,189,172.00	65.74	55,800,551,443.00	100.00

GUBERNUR JAWA BARAT,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/209A6AE30C>